

Dialektika Rasio dan Moral: Refleksi Kritis Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan

A. Pendahuluan

Apa yang tidak bisa kita ketahui? Pertanyaan seperti ini memang tidak lazim dilontarkan dalam filsafat tentang ilmu. Yang sering dikemukakan biasanya *apa yang dapat kita ketahui, bagaimana kita bisa mengetahui*, dan lain sebagainya. Padahal pertanyaan di atas tidak sekedar bermuatan ontologis dan epistemologis, tapi juga bersifat aksiologis, yakni mempertanyakan kembali batas yang bisa kita raih dengan pengetahuan dan bagaimana implementasinya dalam realitas kesejarahan dan kemanusiaan.

Apa yang dapat diketahui manusia hingga saat ini setidaknya-tidaknya telah banyak disingkap. Dilengkapi dengan metode yang kian hari kian disempurnakan, kekuatan rasio kita –dengan kecepatan yang sulit dibayangkan– telah menelanjangi hampir semua busana yang dikenakan alam, bumi dan langit, bahkan Tuhan. Kelahiran ilmu pengetahuan yang dibidani oleh filsafat telah membengkak menjadi bayi raksasa yang dibesarkan oleh air susu rasionalitas manusia. Sebuah ironi jika akhirnya ia juga melahap wilayah kerja filsafat sampai yang tersisa dari ladang ilmu hanya analisis bahasa. Di penghujung abad ini, filsafat menjadi terlalu renta untuk berpacu dengan anak asuhnya sendiri.

Jika demikian halnya, setelah apa-apa yang dapat kita ketahui dengan kekuatan rasio,¹ apa lagi yang belum atau masih akan kita ketahui?. Sampai kapan dan dimana kita tidak lagi merasa perlu mengetahui “sesuatu”?. Apakah “sesuatu” yang tidak akan dapat diketahui itu?. Bisakah kita

Oleh : Irwindra

Rasio, sebagai sebuah kekuatan dan alat bagi perkembangan ilmu pengetahuan telah menghadirkan wajah-wajah yang “menawan” bagi kehidupan saat ini. Namun dibalik itu, tersimpan luka yang semakin kronis yang dapat menular dan menggerogoti sendi-sendi kemanusiaan dan keber-ada-an kita sebagai makhluk yang unik dan memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Moral-spiritual, itulah yang menjadi pertarungan kita saat ini di tengah menguatnya bangunan ilmu yang dipandu oleh nahkoda rasionalitas.

Key word : Rasio, Moral, Ilmu

mengetahuinya?.

Kita tidak sedang menyuarakan keputusasaan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam keinginan untuk mempertanyakan, tersimpan tidak hanya keraguan, tapi juga cinta. *Keraguan dan cinta*: dua hal yang meresahkan dan oleh karena itu kurang disukai dan harus ditinggalkan. Mengapa demikian?.

Kita hidup di tengah peradaban di mana segala sesuatu harus ditentukan, dirumuskan, didefinisikan dan akhirnya dikotak-kotakkan. Ilmu pengetahuan dengan teknologi sebagai anak kandungnya telah menjadi pilar utama zaman modern ini. Produk-produk yang di ramu di laboratorium ilmu membuat hidup jadi mudah. Dunia terasa sempit dan kecil, jarak

dan waktu terjembatani.

Apa yang disodorkan ilmu untuk kita adalah barang jadi yang harus kita terima untuk kemudian diyakini. Ilmu pengetahuan menjawab segala keraguan dan persoalan. Maka sikap mempertanyakan hanya akan meruntuhkan jerih payah manusia yang berabad-abad lamanya membangun konstruksi ilmu pengetahuan yang bertumpu sepenuhnya pada kekuatan rasio. Maka dalam percepatan pertumbuhannya, ilmu menyisakan sedikit sekali waktu dan ruang untuk kita sejenak meragukan. Dengan ilmu pengetahuan pula, manusia menciptakan sistem dan mekanisme dalam kehidupannya di mana pada akhirnya kita hanya menjadi satu sekrup kecil saja dari mesin raksasa itu. Bukan kita lagi yang memegang kendali mesin yang kini sedang menggelinding kencang, melainkan kitalah yang akhirnya terserimpung lalu terpuruk dalam kubangannya. Manusia tidak lagi membuat pengetahuan, tapi justru ilmu pengetahuanlah yang telah menciptakan skenario bagi pola dan perjalanan kehidupan, dan yang pada gilirannya mencetak sosok-sosok makhluk yang bernama manusia.

Ilustrasi di atas mengandaikan kepada kita sesuatu yang lain yang luput dari jaman rasio. Ada satu wilayah dalam ruang kemanusiaan yang jarang dibicarakan, yaitu *realitas nilai*² (baca: moral). Realitas ini sebenarnya hadir bersamaan (simultan) ketika ilmu berhadapan dengan obyek-obyek kajiannya. Dengan kata lain, pada segala sesuatu yang menjadi obyek ilmu, di sana pula nilai bermukim. Dalam bahasa ontologi, sebuah obyek inderawi mengandung substansi sekaligus esensi.³ Cuma sayangnya ia tidak tampil dalam substansi-substansi yang jelas dan terukur sehingga layak untuk dirumuskan, melainkan penampakkannya hadir di selaput

kesadaran terdalam manusia. Amat sulit menemukan dimensinya jika pandangan rasionalitas kita terbiasa ditujukan pada simbol-simbol konkrit, sementara nilai tidak terbiasa bicara dengan menggunakan simbol.⁴ Ia ingin tampil apa adanya.

Kejengahan ilmu pengetahuan modern untuk mengurai simbol-simbol itu membuat wilayah nilai semakin dianaktirikan sampai akhirnya meranggas. Akibatnya ilmu semakin eksklusif dengan struktur dan spesifikasinya sendiri dan membiarkan wilayah itu digarap oleh para pemerhati nilai yang bersuntuk untuk menjadi penafsir simbol nilai sekaligus pemberi makna. Sifat eksklusifitas ilmu bukan saja dikarenakan oleh keniscayaan rasio untuk menyentuh realitas nilai, tapi juga dikarenakan saratnya muatan konflik yang dikandung realitas itu dalam dirinya sendiri,⁵ sementara para penafsirnya pun tidak punya kesepakatan yang jelas dan tepat tentang ukuran yang akan mereka kenakan. Contoh yang paling acap di angkat adalah tentang nilai kebebasan. Tidak seorangpun punya cukup keberanian untuk menjamin kebebasan orang lain karena ia juga tidak mampu menjamin nilai kebebasannya sendiri. Persoalan yang sama juga dihadapi ketika orang mencoba menerjemahkan nilai keadilan.⁶

Lalu apa salahnya jika kemudian ilmu membatasi diri untuk tidak terbebani oleh hal-hal yang dalam kacamata rasio dianggap kurang jelas. Penegasan garis demarkasi untuk wilayah kajian masing-masing adalah salah satu upaya pragmatis yang semakin mengukuhkan otonomi ilmu dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Ilmu menentukan sendiri kriteria kebenaran yang ia aplikasikan dalam keluasannya, demikian juga nilai. Apa-apa yang diasumsikan oleh ilmu sebagai kebenaran diujikan dalam kriteria tersebut

sebagai sesuatu yang memadai dalam situasi dan kondisi tertentu. Perubahan-perubahan yang diberlakukan dalam kriteria itupun dimungkinkan sejauh hal itu dilakukan atas dasar kebenaran yang diakui ilmu itu sendiri. Dengan demikian ilmu pengetahuan memiliki otoritas yang tidak ditentukan faktor di luar dirinya, termasuk nilai.

Dengan pendirian di atas, ilmu pengetahuan dapat membentangkan sayap seluas-luasnya dalam kehidupan manusia. Keputusan-keputusan yang harus dibuat manusia dalam rangka menyelesaikan soal-soal yang muncul dalam kehidupannya akan lebih efektif jika manusia melibatkan peran serta nilai. Dengan nilai pula manusia bisa membuat prediksi dari pilihan-pilihan yang disodorkan kepadanya serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap keputusan. Kekeliruan-kekeliruan yang mungkin muncul, juga dapat diperkecil jika manusia berpedoman pada arah yang digariskan ilmu dan perangkat kerjanya.

Tapi, sebagaimana telah kita paparkan di atas, bahwa kelayakan-kelayakan yang dapat dinikmati manusia dari produk ilmu yang diusahakannya malah memanjakan manusia untuk mencari sesuatu yang belum diketahuinya. Kebenaran menjadi liang kubur terakhir yang digali manusia untuk dirinya sendiri. Padahal dalam konteks tertentu, kebenaran ilmiah pada dasarnya juga adalah sebuah interpretasi atas makna. Lalu mengapa kebenaran ilmiah enggan untuk bersentuhan dengan nilai?⁷ Apakah karena keterlibatan, kegiatan ilmiah khawatir kehilangan obyektifitasnya?, atau karena persoalan-persoalan nilai tidak sekedar pilihan atas baik atau buruk (etika) tetapi juga menyoal keterlibatan manusia dalam segala proses pengetahuannya dan itu berarti mempertanyakan falsafah dasar dari sifat subyektif manusia.

Kondisi ini kemudian membuat posisi

ilmu di satu pihak dan nilai di pihak lain menjadi saling “tarik-menarik”, apalagi ketika disusupi oleh dan untuk kepentingan-kepentingan yang sama sekali berada di luar konteks keilmuan (epistemologi). Lebih lanjut, manusia sebagai pelaku utama berada pada posisi di persimpangan jalan: arah mana yang harus diikuti? Problem ini dari waktu ke waktu akan terus “menggelinding” dan menjadi kompleks serta pelik, ibarat bola salju yang semakin lama semakin membesar dan siap menabrak dan menggoyahkan apa saja yang dilewatinya.

B Moral : Milik Siapa ?

Manusia memiliki keistimewaan apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ia mempunyai dimensi jasmaniah dan dimensi rohaniah. Yang pertama bersifat imanen dan yang kedua bersifat transenden. Keduanya merupakan kesatuan dalam menggerakkan dan merealisasikan potensi-potensi dirinya: berada sebagai manusia berarti memperistiwakan diri sendiri dalam alam jasmani, sehingga peristiwa manusia selamanya juga berupa peristiwa alam jasmani.⁸

Kualitas-kualitas yang dimiliki manusia ini kemudian melahirkan dinamika yang secara terus menerus berubah dan cenderung meningkat dan berkembang, atau dalam ungkapan yang lain, karena manusia berpengetahuan, yang dengan itu ia bertanggung jawab menyingkap realitas hidupnya baik dalam gagasan, kesadaran dan tindakan. Dengan pengetahuannya manusia melakukan transendensi terhadap realitas, membuka pintu yang menutup kebenaran realitas: disini, ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia yang secara khusus dengan objek tertentu, terstruktur, sistematis, rasional dan dengan menggunakan metode tertentu, menyingkap tabir yang menutup realitas. Ilmu pengetahuan memungkinkan manusia berkomunikasi dan dengan

demikian meningkatkan martabat manusia, karena dengan menemukan kebenaran maka kualitas manusia menjadi teruji.

Ditengah-tengah usaha manusia dalam mengaktivisasikan, membentuk dan membangun diri dan realitasnya, secara bersamaan ia di hadapkan pada berbagai pilihan-pilihan⁹ dan putusan yang harus di ambil dan diterima. Bahkan terkadang ia menjelma dalam bentuk konflik diri yang mendalam. Tidak sedikit dari konflik diri yang terjadi memasuki wilayah etika-moral. Sehingga dapat dikatakan bahwa problem moral adalah problem manusia yang dari waktu ke waktu terus berubah dan berkembang. Oleh karenanya, ketika memperbincangkan persoalan moral, sesungguhnya kita sedang membicarakan diri sendiri sebagai makhluk yang bebas. Di dalam persoalan moral, antara fakta, pertimbangan dan pilihan (keputusan) adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, moralitas adalah suatu masalah bagi pelaku-pelaku moral, makhluk-makhluk yang bertindak, yang melakukan pilihan dan yang melakukan sesuatu secara sadar.¹⁰ Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal, ia khas manusiawi.¹¹ Moral juga bertindak sebagai hukum bagi makhluk rasional.¹²

Dalam perjalanan ilmu filsafat, masalah moralitas (etika) mendapat tempat kajian yang sangat terhormat. Sejak zaman Yunani Kuno, Renaissance, sampai dengan eranya Erich Fromm.¹³ Etika dan moralitas selalu menjadi kajian utama yang tidak pernah tuntas menuju arah penyelesaian, namun selalu muncul dengan pengejawantahan permasalahan moral yang baru, kompleks, dan multi dimensional (sebagai contoh adalah masalah *euthanasia*, klonning, dan lain sebagainya).

Sekalipun diusianya yang semakin tua, etika yang mewujud dalam bentuk kesadaran

moral tidak dengan serta merta menjadi sesuatu yang siap saji dan instan, ia beranjak secara bertahap seiring dengan perkembangan yang terjadi pada diri manusia, dari tahapan pra-moral ke moral. Pada tahap pra-moral, manusia belum mampu menjalankan kemanusiaannya. Hanya dengan lambat laun dia bertumbuh, kemudian dia bisa berfikir dan berkehendak.¹⁴ Dalam pandangan Abu A'la al-Maududi, moral merupakan pembawaan manusia sejak lahir dan lambat laun akan semakin bertambah melalui faktor usia sebagai bahan standar umum lainnya dari tingkah laku moral, dimana ada sifat-sifat yang dapat diterima dan ada juga yang tidak.¹⁵

Dalam proses yang berlangsung ini yang terjadi adalah dialektika moral antara manusia sebagai pelaku moral dengan realitasnya. Ia berhubungan dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi terbentuknya pribadi yang *insan kamil*. Moral tidak menampakkan dirinya (bereksistensi), tetapi ia adalah sebuah esensi (baca: potensi) yang terdapat dalam diri manusia. Moralitas timbul dari hidup itu sendiri dan merupakan suatu usaha untuk menemukan dan menghayati kehidupan yang baik –cara ber-”ada” dan meng-”ada”; yakni kehidupan yang sehat, bahagia, berfaedah untuk masyarakat dan berkembang sepenuhnya.¹⁶ Dan disini pulalah salah satu letak keunikan manusia dengan makhluk lainnya. Dan oleh karena itu, sesungguhnya, “ketika kita belajar tentang etika (khususnya akhlak),¹⁷ maka kita sedang belajar untuk *menjadi* manusia.

Secara filosofis, Adelbert Snijders mengungkapkan bahwa :

Dalam metafisika-”ada” tingkat keunikan ditentukan oleh tingkat-ada. Dasar kesamaan dalam hal “ada” bukan horizontal melainkan vertikal. Setiap “keunikan” di dunia ini bersifat *contingens*, berarti berada

tetapi juga dapat tidak berada, yaitu tidak mempunyai dasar-berada pada dirinya sendiri. Setiap hal yang *contingens* hanya berada karena relasi yang dasariah dan vertikal. Segala keunikan di dunia ini bersifat “diciptakan”. Sang Pencipta hadir di dalamnya sebagai “Dasar Cukup”. Segala keunikan di dunia ini adalah “anugerah”. Dasar Cukup itu sendiri tidak membutuhkan dasar di luar diri-Nya. Dia identik dengan dasar-Nya, tidak ada awal dan akhir, kekal abadi. “Dia adalah Tuhan”. Keunikan ada pada kita sebagai anugerah dan sesuai dengan tingkatan-ada, yaitu ada keunikan yang rendah dan ada yang lebih tinggi. Relasi vertikal dalam diri manusia bersifat personal. Manusia terbuka untuk mengetahui dan menyadari relasi vertikal tersebut. Kesadaran inilah membuat manusia bersujud dan menyembah. Cinta Allah mendapat respons dalam diri saya. Manusia juga terbuka untuk sesama dan untuk segala kenyataan yang menyatakan diri dengan cara yang berbeda dan sesuai dengan tingkatan-tingkatan keunikan masing-masing. Keterbukaan manusia “seluas segala kenyataan”. Relasi vertikal dalam segala ada-an merupakan dasar kesamaan dan dasar keunikan. Keunikan adalah anugerah yang berasal dari sumber yang sama. Dalam segala keunikan, hadir “relasi kepada Sang Pencipta”. Refleksi metafisis atas keunikan dan kesamaan sekaligus menjadi argumen ketuhanan.¹⁸

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk yang berkesadaran, atau memiliki hati nurani (unik) –yang merupakan perangkat dari moral– harus menampilkan keunikannya, yang dengan itu identitasnya sebagai makhluk yang unik bernilai bagi dan dalam perjalanan eksistensinya. Disinilah masalah moral mendapat pijakan, sehingga ia merupakan sesuatu yang menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Ia bukan merupakan bagian tertentu dari bidang dan tingkat

hidup manusia. Persoalan moral bukan sekedar persoalan moral, akan tetapi juga merupakan persoalan pribadi, sosial, ekonomi, politik dan internasional:¹⁹ kesatuan (dimensi jasmani dan rohani; penulis) yang lebih sempurna barulah dicapai jika hidup manusia diharmoniskan, disatukan dan diintegrasikan oleh dan dalam *kepribadian*,²⁰ yang susila.²¹

Jika demikian halnya, maka sesungguhnya apapun yang dihasilkan atau merupakan produk dari pemikiran dan perilaku manusia harus selalu didasari dari dan oleh kodrat manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk yang ber-akalbudi,²² dan diarahkan pada sebuah kondisi yang mampu mengangkat citra manusia, sebagai makhluk yang melakukan pilihan-pilihan moral.

c. Ilmu: Menuju Manusia yang Tercerahkan

Sebagai makhluk yang menjasmani – menurut Drijarkara– atau makhluk yang terdiri dari matra manusia, di samping matra malaikat –menurut Ibnu Khaldun– manusia melakukan interaksi yang relasional-konstruktif bagi dan terhadap dirinya. Manusia, dengan segenap potensi²³ yang ia miliki mencoba keluar dari dirinya. Dalam hal ini Louis Leahy mengatakan bahwa manusia diperlengkapi dengan jiwa –yang tak dapat direduksikan kepada dimensi badaniah, yang dengan itu ia menjadi suatu makhluk yang khas dan unggul. Lebih lanjut Leahy menjelaskan, bahwa jiwa manusia mempunyai fungsi, yang di antaranya adalah pikiran (1) sebagai daya *pelampauan*. Dengan daya ini manusia mampu membuat lompatan-lompatan yang menggagumkan dalam kehidupan; (2) sebagai daya *unifikasi* yang bersifat menyeluruh, berhubung dengan segala macam data yang dimilikinya. Melalui daya ini pula manusia menghimpun data-data dari pengalamannya. Disini,

manusia bukan saja memikirkan dunia, tapi ia juga “menciptakan” dunia-dunia. Dengan demikian, daya (pikiran) mewujudkan suatu transendensi otentik terhadap materi; (3) sebagai daya *refleksi* yang dengan ini justru menunjukkan ketidaktergantungannya terhadap materi dengan cara refleksi atas dirinya sendiri; dan (4) *kebebasan* sebagai daya kebebasan. Daya inilah memungkinkan semua menjadi berwujud.²⁴

Penjelasan di atas, menyiratkan bahwa dalam konteks pengetahuan ia merupakan ciri dari ber-”ada” dan yang meng-”ada”nya manusia. Malaikat dan hewan memiliki pengetahuan, namun pengetahuannya berbeda dengan manusia.²⁵ Pada manusia, pengetahuan sesungguhnya mengandung suatu nilai yang ada pada dirinya sendiri, sehingga ada semacam korelasi antara pengetahuan dan “ada”, antara tingkat pengetahuan suatu “pengada” dan tingkat kepenuhan yang dapat diberikannya kepada eksistensinya. Pengetahuan menjadikan manusia berhubungan dan mengerti dengan orang lain dan dengan apa yang ada di sekitar.²⁶ Oleh karenanya, pengetahuan dapat dipahami sebagai sebuah usaha dan upaya manusia untuk melakukan imanensi²⁷ yang sekaligus juga bertransendensi.²⁸

Kebenaran dan kepastian pengetahuan, sesungguhnya hanya terjadi di dalam pengalaman eksistensial manusia. Bukan kebenaran yang jadi, tapi kebenaran yang terus “menjadi”, bukan pula kebenaran riil yang statis, tetapi kebenaran yang “merealisasi” dan “mentransformasi” diri di dalam eksistensi dan koeksistensi yang menyebar. Sikap ini sekaligus merupakan reaksi penolakan terhadap sikap rasa “keserbatahuan”, serta menekankan pada sikap kerendahan hati, kesabaran dan asketis intelektual dalam rangka pengembangan epistemologi.²⁹

Dengan demikian, pengetahuan lebih merupakan suatu *cara berada* daripada suatu

cara mempunyai. Untuk itu, ia tidak berupa penyitaan atau pemilikan benda-benda; sebaliknya berupa *keterbukaan* terhadap mereka. Tidak berupa penggunaan mereka, tetapi berupa kesadaran tentang eksistensi dan kodrat mereka. Ia suatu kesempurnaan yang mengembangkan eksistensinya.³⁰

Dalam tradisi pemikiran Islam, pengetahuan yang digambarkan di atas, tercermin dari pemakaian dan operasionalisasi dari makna yang terkandung dalam kata *‘aql*. Dari segi arti, *‘aql* sama dengan *al-hijr* atau *an-nubâ* yang berarti “kecerdasan”. Dalam bentuk kata kerja *‘aqala* ia bermakna *habasa* yang memiliki arti “mengikat” atau “menawan”.³¹ Dari pengertian ini berarti bahwa akal mampu mencegah (mengikat) manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan dan menghinakan martabat kemanusiaannya. Dengan dan melalui akalnya, manusia tampil sebagai seorang yang menarik dan memikat, sehingga orang yang berada di sekitarnya pun merasa aman dan nyaman. Bahkan, kehadirannya menjadi sesuatu yang membawa dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi : “sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya”.

Lebih rinci, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akal mempunyai banyak pengertian. Ia dapat berarti potensi yang membedakan manusia dari binatang dan yang menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. Akal juga berarti pengetahuan yang dicerna oleh seorang anak yang telah mendekati usia dewasa, dimana –misalnya– ia dapat mengetahui bahwa sesuatu tidak mungkin ada pada sesuatu yang pada saat yang sama ia tidak ada juga di tempat itu, atau dua itu lebih banyak dari satu. Makna ketiga dari akal, menurut al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang

berdasar pengalaman yang dilaluinya dan yang pada gilirannya memperhalus budinya. Menurut kebiasaan, orang yang demikian ini dinamai “orang berakal”, sedang orang yang kasar budinya dinamai “tidak berakal”. Makna keempat dari akal adalah kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya, lalu mampu menekan hawa nafsunya serta mengatasinya agar tidak terbawa larut olehnya.³²

Nashiruddin al-Tusi (w. 1274) juga menyatakan bahwa akal sebagai kesempurnaan (*kamâliyah/entelechy*) manusia, yang di atasnya tergantung harkat dan esensi manusia. Akal mempunyai kecakapan kognitif, sehingga mampu menyerap entitas-entitas *ma'qûlât* (rohani), membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, dan antara yang benar dan salah. Selain memiliki fungsi kognitif, akal juga memiliki fungsi mengatur (*managing principle*).³³ Hal senada juga diungkapkan oleh ‘Abas Mahmud al-‘Aqad, bahwa akal merupakan petunjuk yang membedakan hidayah dan kesesatan, ia adalah kesadaran batin dan penglihatan batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan mata.³⁴

Pemahaman atas konsepsi akal di atas, melahirkan suatu rancang-bangun yang bercorak khas bagi tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Aktivitas keilmuan tidak bisa dipahami secara satu sisi dalam kehidupan di alam semesta ini, ia tidak hanya dibatasi pada wilayah defenisi³⁵ semata, melainkan ia merupakan wujud dari pemahaman manusia secara total terhadap keberadaannya. Tepat pada saat manusia mengaktifkan potensi rasionalitasnya untuk membuat pilihan-pilihan dengan pijakan ilmu pengetahuan yang ia miliki, ketika itu juga nilai (moral) harus diperansertakan. Dalam kegiatan keilmuan, baik teoritis

maupun praktis, pertimbangan-pertimbangan nilai yang disodorkan secara interpretatif oleh etika sebagai suatu falsafah, hendaknya mendasari kegiatan tersebut.

Mengapa demikian? Manusia, sebagai makhluk yang memiliki kebebasan –yang dengan itu ia berkemampuan untuk melakukan eksplorasi dan bereksperimen– harus pula dibarengi dengan adanya sebuah pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat dengan kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan sebagai bagian dari kajian etika (filsafat moral), memberikan keleluasaan bagi manusia dalam menentukan sendiri tindakannya, dan oleh karenanya ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanpa tanggung jawab, etika tidak akan berguna.³⁶ Disini, antara kebebasan dan tanggung jawab memiliki hubungan yang timbal balik, yang satu dengan lainnya saling berimplikasi pada : kebebasan-mempertanggungjawabkan; tanggung jawab-bebas untuk memilih³⁷: manusia tidak mungkin menyadari kebebasannya jika ia tidak melakukan sesuatu, jika ia tidak menjelmakan kemungkinan kebebasannya ke dalam aktus-aktus yang konkret. Manusia mengenal dirinya sendiri di dalam pertemuan dan pergaulan dengan dunia dan orang-orang lain. Begitu pula manusia hanya dapat menyadari kebebasannya kalau ia dapat mewujudkan kebebasannya itu dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat “menguasai dunia” dan “menaklukkan bumi”.³⁸

Namun, jika yang terjadi sebaliknya, rasio *merasa bebas*³⁹ untuk berbuat apa saja, maka pertanyaan baru pun akan muncul ke hadapan kita, apakah moral hanya milik orang-orang tertentu saja?, apakah moral (nilai) merupakan sesuatu yang asing dan *tabu* bila diikutsertakan dalam ranah keilmuan? Atau apakah moral hanya merupakan faktor x yang keberadaannya

sudah tidak lagi menarik (relevan) bagi kehidupan sekarang?

Untuk itulah, sejak awal, Islam tidak membedakan antara urusan duniawi dengan urusan ukhrawi, demikian pula halnya dalam masalah ilmu: “*barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu*” (hadits Nabi). Bahkan, kedudukan orang-orang yang berilmu menjadi salah satu kriteria bagi diangkatnya derajat seseorang.⁴⁰

Kondisi di atas sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada peradaban modern saat ini. Corak berpikir rasionalisme dan empirisme telah melahirkan sebuah bangunan keilmuan yang tidak utuh, atau dalam istilah Seyyed Hossein Nasr, *fragmented knowledge*. Cara pandang yang rasionalistik, empiristik dan kuantitatif dalam sistem dan metode pengetahuan mengakibatkan manusia modern dilanda kehampaan spiritual. Hal ini menurut Nasr, yang dalam beberapa tulisannya lebih sering menggunakan istilah dan atau pendekatan tradisi,⁴¹ berakar dari tradisi filsafat Barat modern yang dilandasi wacana ontology dualisme Cartesian tentang jasmani dan rohani, yang menggantikan pembagian tak terpisahkan antara tubuh, jiwa dan roh (*corpus, anima, spiritus*) dari tradisi Hermetik yang kemudian diungkapkan kembali dalam tradisi *Isyraqiyah* Islam. Dengan landasan semacam itu, muncullah paham manusia yang tidak total. Lebih lanjut, berimplikasi terhadap upaya penolakan atas hakikat spiritualitas dan penyingkiran maknawiyah secara gradual dalam pemikiran filsafat Barat modern. Untuk selanjutnya, manusia modern membebaskan diri dari Tatanan Ilahi (*Divine Order*) dan membangun tatanan antropomorfisme –tatanan yang semata-mata berpusat pada manusia. Hingga

manusia menjadi “Tuan atas nasib dirinya sendiri” (*master of his own destiny*), yang mengakibatkan terputus dari tali spiritualitasnya. Inilah akar dari segala krisis peradaban modern.⁴² Dalam nada yang relatif sama, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata (*live by bread alone*); mereka bahkan berupaya “membunuh” Tuhan dan menyatakan kebebasan dari kehidupan akhirat.⁴³

Kehilangan makna sakral lanjut Nasr, digambarkan sebagai sesuatu dalam keadaan fana, tidak permanen dan menjadi budak dari alam rendahnya sendiri, menyerah kepada apa yang dianggap sebagai kebebasan. Dia secara pasif mengikuti aliran yang menuju ke bawah siklus sejarah manusia, yang dibanggakan dengan mengklaim bahwa dalam melakukan demikian dia menciptakan nasibnya sendiri.⁴⁴

Dalam perspektif lain, Syed M. Naquib al-Attas memandang bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari ketiadaan *adab* dalam segala aspek kehidupan. Baginya, ilmu dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan-tujuan sosial-ekonomi, tetapi secara khusus juga berperan dalam mencapai tujuan-tujuan spiritual manusia. Hal ini tidak berarti bahwa aspek-aspek sosial-ekonomi dan politik tidak penting, tetapi kedudukannya lebih rendah dan lebih difungsikan sebagai pendukung aspek-aspek spiritual. Konsekuensinya, kita perlu mendefenisikan ilmu dalam kaitannya dengan realitas spiritual manusia.⁴⁵

Sampai disini, pengetahuan, sebagaimana yang diungkapkan di atas, adalah lebih kepada *cara berada* manusia. Ini berarti bahwa, cara pandang tentang alam sebagai sesuatu yang mesti dikaji dan ditelaah secara kuantitatif, ditaklukkan, dikendalikan, dimanipulasi dan akhirnya

diperkosa dan dipermak dengan sangat buas harus ditolak. Karena, jika cara pandang tersebut masih terus menjadi bagian dari pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan, maka akan mengakibatkan munculnya berbagai krisis baik terhadap eksistensi manusia itu sendiri maupun lingkungannya.⁴⁶

Dengan demikian, rasio sebagai salah satu sumber dari ilmu harus mencirikan keber-ada-an manusia sebagai makhluk yang bermoral, makhluk yang memiliki dimensi rohani, di samping dimensi jasmani. Dua hal ini menyatu-padu dalam sebuah bangunan keilmuan. Ia saling berkait-berkelindan, saling menopang dan mengukuhkan satu sama lain. Tidak ada yang memposisikan diri sebagai superior dan yang lain inferior. Sejalan dengan ini, Fakhruddin ar-Razi secara apik mengungkapkan: “akhir dari kesungguhan akal manusia adalah keterbelengguan, dan kebanyakan usaha manusia menuju kesesatan; Kita tidak memperoleh sepanjang usia pencarian kita, kecuali mengumpul bahwa menurut si A begitu, dan menurut si B begini”⁴⁷

Rasio dan moral, adalah dua hal yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, kedua hal tersebut harus dirangsang dan ditumbuh-kembangkan menjadi sebuah kekuatan sekaligus keunikan yang membuat manusia tampil sebagai makhluk yang ber-”ada” dan meng-”ada” dalam arti yang sesungguhnya. Dengan dan melalui kedua hal inilah bangunan ilmu dan peradaban menjadi bermarwah dan menghantarkan manusia kepada suatu titik kesempurnaan, atau dalam terminologi Islam, makhluk yang *kâffah, insan kamil*.

d. Penutup

Dominasi rasio atas moral merupakan sesuatu yang sangat merugikan, bahkan sampai pada titik tertentu ia justru dapat

membinasakan. Boleh jadi, pada abad ke-19 yang lalu, seorang Nietzsche (1844-1900), berteriak lalu berkata: “Tuhan telah mati”. Pada abad sekarang ini, bisa jadi kita berteriak dan berkata: “ke-Manusia-an telah mati”. “Ketegangan” antara rasio dan moral yang selama ini kita rasakan, nikmati dan jalani, serta sama-sama persaksikan sejak lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan sampai hari ini, adalah sebagai akibat dari kebingungan sudut pandang dan keterbelengguan atas jerat-jerat rasionalitas. Padahal, hemat penulis, sesungguhnya, ilmu tidak hanya untuk mencerdaskan, melainkan juga harus mencerahkan manusia atas ber-”ada” dan meng-”ada”-nya.

Pada akhirnya, kita harus berkata: “Kita sangat peduli dengan Barat, karena kita menemukan diri kita berhadapan dengannya. Tapi kita harus bertanya juga: Bisakah kita menghadapi Barat dan mengumumkan, pengetahuan mana yang baik dan yang buruk; juga apa yang cocok dan yang tidak –tanpa sebelumnya mengetahui diri kita sendiri?”

WaLâhu yahdi man yasyâ' ilâ sabîlih

Endnotes

- ¹ Rasio merupakan kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Ia juga merupakan kemampuan untuk menyimpulkan. Biasanya, rasio dianggap sebagai ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah. Ia dibedakan dari iman, wahyu, intuisi, emosi atau perasaan, pencerapan, persepsi, pengalaman. Dalam hubungannya dengan *intelekt*, dalam pengertiannya yang luas, rasio sama dengan intelek. Dalam arti ini rasio adalah daya tahu rohani manusia yang berbeda dari daya indera. Sedangkan dalam arti sempit, rasio tidak sama dengan intelek. Secara umum, intelek terutama mengacu pada kegiatan mengabstraksikan, membandingkan dan

menganalisis pemikiran. Sementara rasio menunjuk pada kegiatan-kegiatan pikiran yang lebih tinggi yang mencari keteraturan dan kesatuan positif dalam pikiran dan tindakan. Pengertian di atas berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Immanuel Kant. Baginya, intelek adalah daya untuk membentuk konsep dan penilaian atau putusan. Sedangkan rasio dalam arti sempit merupakan daya untuk menarik kesimpulan dan karenanya mencari yang tidak bersyarat di dalam bersyarat. Oleh karenanya, rasio mengalami kesesatan atau kekeliruan, dan oleh sebab itu pulalah rasio lebih rendah daripada intelek dalam nilai pengetahuannya. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 925-28. Lihat juga hlm. 356-57.

- ² Masalah nilai dalam kajian filsafat dikenal dengan istilah aksiologi, yang memiliki pengertian “analisis terhadap nilai-nilai”. Analisis yang dimaksud adalah membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria, dan status epistemologis dari nilai-nilai tersebut. Jadi ia merupakan studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai. *Op.cit.*, Lorens Bagus, hlm. 33. Dalam konteks tulisan ini, persoalan nilai lebih ditekankan pada aspek nilai-nilai moral (etika), atau disebut juga dengan filsafat moral, yang merupakan bagian dari kajian aksiologi. Lihat Harold H. Titus, et.al., *Persoalan-persoalan Filsafat*, diterjemahkan oleh M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 120, dan Louis O Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm. 327
- ³ Louis O. Kattsoff, *Ibid.*, hlm. 345
- ⁴ Nilai tidaklah memberi atau menambah eksistensi, seperti yang terdapat pada batu sebelum dipahat, sebelum ia diubah bentuknya menjadi sesuatu yang baik. Kualitas dasar yang tanpa itu obyek tidak dapat menjadi ada disebut “kualitas primer”. Di samping itu terdapat “kualitas sekunder”, atau kualitas yang dapat ditangkap oleh panca indera (misal: warna, rasa, bau, dan sebagainya), yang dapat dibedakan dengan yang “primer”, yang terpengaruh oleh besar kecilnya tingkat subjektifitas. Oleh karenanya, akan lebih tepat dikatakan bahwa nilai itu merupakan “kualitas yang tidak riil”. Nilai tidak menambah realitas atau substansi pada obyek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat, kualitas, *sui generis*, yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik. Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 8-9
- ⁵ Pengaruh yang diberikan oleh aliran rasionalisme dan empirisme dalam perjalanan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dirasakan sangat memberikan efek besar bagi terbentuknya corak ilmu pengetahuan dewasa ini. Semakin meluasnya jarak pemisah antara ilmu di satu sisi dan nilai pada sisi lain adalah problem yang sampai hari ini belum menemui kata final. Kalaupun masih tersisa unsur-unsur nilai (moral) pada “diri” ilmu, itu tidak lebih dari apa yang disebut oleh Harold H. Titus sebagai nilai subyektif. Nilai dalam hal ini selalu merupakan pengalaman, bukannya benda atau obyek. Apa yang ada di sekeliling kita boleh (mungkin) berharga, akan tetapi ia bukan merupakan suatu nilai. Nilai selalu bergantung kepada hubungan antara seorang penganut dan hal yang dinilai. Harold H. Titus, *Op.cit.*, hlm. 123-124. K. Bertens mengungkapkan, paling tidak, nilai memiliki 3 ciri, yaitu (1) nilai berkaitan dengan subyek; (2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dan (3) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang di”tambah” oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 141

- ⁶ Problem ini terlihat jelas ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi beberapa waktu lalu, dimana muncul pertentangan antara dua pihak, yaitu yang pro dengan RUU APP dan yang kontra. Masalah kebebasan –yang merupakan salah satu kajian dalam filsafat moral— berkesenian dan berekspresi menjadi salah satu isu utama dalam kasus di atas. Demikian pula dengan persoalan yang menyangkut penegakkan keadilan. Keadilan selalu tampil dengan wajah yang menakutkan bagi orang atau pihak yang tidak beruntung (baca: kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin). Ia cenderung untuk berpihak kepada sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Kasus seorang nenek tua “Minah” yang ketahuan mencuri 3 buah kakao di Banyumas, Jawa Tengah dan kemudian divonis selama 1,5 bulan. Begitu pula dengan Basar dan Kholil dari Kec. Mojojoto, Kota Blitar yang dimejahijaukan gara-gara mencuri buah semangka. Kasus ini bertolak belakang dengan apa dilakukan oleh Anggodo Widjojo, Gayus dan yang lainnya yang diduga telah merugikan negara sampai miliaran rupiah.
- ⁷ Kehidupan selalu saja menghadirkan berbagai pilihan sekaligus memaksa kita untuk mengadakan pilihan, mengukur benda dari segi lebih baik atau lebih jelek dan untuk memberi formulasi tentang ukuran nilai. Individu dalam hal ini, mempunyai perasaan tentang nilai dan tak pernah terdapat suatu masyarakat tanpa sistem nilai. Jika kita tidak melakukan pilihan kita sendiri, maka waktu atau

teman-teman kita atau kekuatan-kekuatan luar lainnya akan menetapkan pilihan itu untuk kita, dan ini berarti penetapan kita juga. Oleh karena itu maka soalnya bukan apakah kita harus atau tidak perlu mempunyai ukuran, keyakinan, kesetiaan atau idealisme yang atas dasar-dasarnya kita mengatur kehidupan. Soalnya adalah apakah ukuran-ukuran tersebut harus konsisten atau tidak konsisten, harus mengembangkan kehidupan atau merusaknya. Menganggap sepi peran nilai berarti mempunyai gambaran yang keliru atau dari satu segi tentang manusia dan alam. Harold H. Titus, et.al., *Op.cit.*, hlm. 119-120

⁸ N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1989), hlm. 9

⁹ Lihat Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, diterjemahkan oleh Edhi Martono, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 38

¹⁰ Harold H. Titus, et. al., *Op.cit.*, hlm. 142. Lihat juga dalam Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, diterjemahkan oleh Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5

¹¹ K. Bertens, *Op.cit.*, hlm. 12

¹² Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, diterjemahkan oleh Robby H. Abror, (Yogyakarta: Insight Reference, 2004), hlm. 110

¹³ Ulasan tentang sejarah dan perkembangan etika dapat dilihat dalam Sayid Qutub, *Evolusi Moral*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin dan Marwan, (Surabaya: Al-Ihkals, 1993). Lihat juga dalam Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), dan bukunya yang lain *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

¹⁴ N. Drijarkara, *Op.cit.*, hlm. 13-14. Penjelasan yang lebih rinci tentang perkembangan moral dapat dibaca dalam Sayid Qutub, *Op.cit.*

¹⁵ Abu A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967), hlm. 25)

¹⁶ Harold H. Titus, *Op.cit.*, hlm. 145

¹⁷ Menurut hemat penulis, ada perbedaan yang sangat mendasar antara etika dan akhlak. Etika dalam sejarahnya, merupakan pergulatan pemikiran manusia tentang bagaimana seharusnya bertingkah-laku: baik-buruk dan benar-salah dari segi etika (berdasarkan perenungan pemikiran manusia). Dalam perkembangan selanjutnya, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika semakin memiliki arti penting dan dibutuhkan oleh banyak pihak dalam mengatur dan memberikan arahan bagi kehidupan manusia secara universal. Kondisi ini melahirkan berbagai macam bentuk

etika, yang di antaranya adalah etika profesi yang mewujud dalam kode etik profesi. Di sini, etika lebih dimaknai sebagai sebuah kajian yang filosofis untuk kepentingan praktis. Sementara akhlak, dari segi makna, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Miskawaih maupun al-Ghazali merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang lahir dan dinyatakan tanpa terlebih dahulu memerlukan unsur pemikiran dan pertimbangan. Ia lahir secara spontan, tanpa membutuhkan ini dan itu, ia hadir bersamaan dengan "ada"-nya kita: "ketika kita membuat minuman susu dalam sebuah wadah ceret, kemudian menuangkannya ke dalam gelas, maka dapat dipastikan yang keluar adalah air susu. Sebaliknya, ketika minuman kopi yang dibuat, maka tentunya air kopi pula yang akan keluar. Secara logika, suatu kemustahilan jika yang kita buat air kopi, kemudian dituangkan dan keluar air susu." Demikian pula halnya dengan akhlak, ia selalu tampil apa adanya: apa yang ada di dalam (dzahir), maka itu pula yang ada di luar (lahir). Selanjutnya, akhlak senantiasa melandasi dirinya dengan dua pijakan dan pedoman, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah. Konsekuensinya, kapan dan dimanapun akhlak selalu berlaku, ia tidak mengenal ruang dan waktu. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan dua pedoman di atas, maka sesungguhnya akal kita lah yang belum mampu untuk menyelami dan memahami secara baik tentang apa yang menjadi persoalan kita.

¹⁸ Adelbert Snijders, *Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 271-272

¹⁹ Pernyataan ini memberikan sebuah gambaran bahwa persoalan moral berlaku universal, tanpa mengenal sekat-sekat budaya, agama, suku dan bangsa. Moral melingkupi setiap aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif.

²⁰ Kepribadian yang dimaksud disini adalah ketika manusia sudah mencapai tahapan moral dari yang sebelumnya tahapan pra-moral. N. Drijarkara, *Filasafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 63-64. Lihat juga dalam N. Drijarkara, *Percikan*, *Op.cit.*, hlm. 12-16

²¹ N. Drijarkara, *Filsafat*, *Op.cit.*, hlm. 64. Secara lebih khusus John Stuart Mill mengatakan bahwa dasar moralitas yang pokok adalah perasaan-perasaan social manusia. Alex Lanur, "Pengantar" dalam John Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, diterjemahkan oleh Alex Lanur, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. xvi

²² Menurut pengertian Aristotelian, akalbudi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akalbudi teoritis dan akalbudi praktis. **Akalbudi teoritis** (kadang-

- kadang disebut kontemplasi) berarti (1) penalaran atau pemikiran untuk mencapai pengetahuan: (a) tentang apa itu persoalan, (b) tentang apa yang harus menjadi persoalan secara tak terelakkan atau secara niscaya, dan (c) tentang apa yang mungkin menjadi persoalan jika kondisi-kondisi tertentu terjadi. Tindakan ini menghasilkan suatu kesimpulan (pernyataan, pengetahuan, tindakan) dari suatu hal. (2) kemampuan dengannya penalaran atau pemikiran mencapai pengetahuan dilakukan. Sedangkan **Akalbudi praktis** berarti (1) kemampuan yang memungkinkan kita mengamati: (a) cara-cara mana yang tersedia bagi kita untuk mencapai tujuan, (b) yang mana dalam cara-cara ini paling efisien dan/atau paling dekat/sesuai, dan (c) bagaimana menggunakan cara-cara ini dalam perilaku aktual. (2) pertimbangan yang mendalam atau penalaran, pemikiran tentang (a) apa yang akan kita buat dan (b) apa yang tidak kita buat, yang menghasilkan suatu keputusan (pilihan, tindakan, resolusi). (3) akal/pikiran merupakan kekuatan atau fungsi tertinggi dari jiwa (*psyche*) manusia. Dalam pandangan I. Kant **akalbudi teoritis** berarti akalbudi yang membentuk pengetahuan intelektual, seperti pengetahuan ilmiah. Sementara **akalbudi praktis** berarti (1) akalbudi yang merupakan asal pengetahuan tentang perilaku moral (dan juga merupakan sumber perasaan-perasaan dan intuisi religius), (2) akalbudi yang merenung tentang kemungkinan-kemungkinan yang diberikan kepada kita oleh kebebasan kehendak. Di samping itu, Kant juga menambahkan **akalbudi murni** yang berfungsi pada dirinya sendiri tanpa hubungan dengan kemampuan kesadaran yang lain seperti kehendak atau kemauan (selera). Akalbudi ini berlawanan dengan akalbudi teoritis dan praktis. Perlu dibedakan pula antara akalbudi dengan akal sehat. Akal sehat adalah (1) keyakinan-keyakinan “alamiah yang dimiliki oleh individu-individu “awam”, individu-individu “sederhana”, atau penilaian umum individu-individu. (2) gagasan-gagasan yang secara niscaya digunakan dalam kegiatan praktis, atau (3) suatu kepercayaan umum terhadap pengertian dan pengetahuan biasa yang mengatasi argumentasi. Kebenaran-kebenaran akal sehat secara langsung diamati, dan tidak diperlukan bukti untuk mendukungnya. Lorens Bagus, *Op.cit.*, hlm.28-30.
- ²³ Potensi yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membuat manusia istimewa dan memiliki keunggulan dari makhluk-makhluk lainnya, seperti indera, akal (rasio), intuisi (hati).
- ²⁴ Louis Leahy, *Manusia sebuah Misteri: Sintesa Filosofis tentang Makhluk Paradoksal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 225-229.
- ²⁵ Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 30-33
- ²⁶ Louis Leahy, *Op.cit.*, hlm. 71
- ²⁷ Imanen berarti secara aktual sungguh-sungguh hadir dalam sesuatu. Ia dapat pula diartikan sebagai segi “batin” dari suatu obyek, fenomena atau gejala. Imanen juga berarti berada atau terdapat di dalam yang terjadi dalam, atau selama, suatu proses. Dalam konteks epistemologi, imanensi berarti ketergantungan pada kesadaran. Karena itu obyek tidak merupakan sesuatu yang independen yang mentransendir atau mengatasi tindakan mengetahui. Sebaliknya, obyek ditegaskan oleh tindakan mengetahui. Obyek senantiasa berada dalam bidang tindakan mengetahui sedemikian rupa sehingga satu-satunya eksistensi ialah eksistensi pikiran. Imanen dilawankan dengan transenden. Lorens Bagus, *Op.cit.*, hlm. 232-324.
- ²⁸ Transenden berarti *melampaui*, apa yang ada dalam pengalaman kita; *menyeberang*. Istilah ini menduduki posisi penting dalam filsafat Kant. Kant mempertahankan bahwa pengetahuan manusia tidak mampu menerobos ke dalam dunia yang transeden, dunia dari yang “ada-di-dalam-dirinya-sendiri”. Tetapi di pihak lain, tingkah laku manusia diarahkan oleh standar-standar transenden (kehendak bebas, jiwa yang tidak dapat mati, Tuhan). *Ibid.*, hlm. 1118-1119
- ²⁹ Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 116
- ³⁰ Louis Leahy, *Op.cit.*, hlm. 75-76
- ³¹ Ibn Manzûr, *Lisân al-‘Arab*, (Mesir: Dar al-Misriyah li at-Ta’lif wa at-Tarjamah, 1968), jilid 13, hlm. 485
- ³² M. Quraisih Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 86-88.
- ³³ Mulyadhi Kartanegara, *Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 48
- ³⁴ Musa Asy’arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), hlm. 99. Lihat pula dalam Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Pendekatan Holistik*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 107-110.
- ³⁵ Pembatasan lingkup ilmu oleh ilmuwan-ilmuwan Barat modern hanya pada obyek-obyek indrawi, pada awalnya, mungkin merupakan pembagian kapling antara “akal” dan “agama”. Tetapi lambat laun pembatasan ini ternyata telah menjadi pembatasan atau defenisi dari realitas itu sendiri. Pembatasan lingkup ilmu itu sendiri ternyata telah mendorong banyak ilmuwan Barat memandang

- dunia indrawi sebagai satu-satunya realitas yang ada, seperti tercermin dari paham materialisme, sekularisme dan positivisme, yakni pandangan-pandangan filosofis yang biasanya berakhir dengan penolakan terhadap realitas metafisik atau alam ghaib. Mulyadhi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon terhadap Modernitas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 9.
- ³⁶ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 39
- ³⁷ K. Bertens, *Op.cit.*, hlm. 91.
- ³⁸ Nico Syukur, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 17
- ³⁹ “Merasa bebas” tidak bisa disamakan dengan kebebasan, atau merasa dilepaskan dari segala macam ikatan sosial dan moral. “Merasa bebas” sama artinya kita sedang melakukan dan mengalami kebebasan semu. Bebas dalam arti sesungguhnya tidak berarti “lepas dari segala keterikatan”. Sebaliknya, “kebebasan sejati” mengandaikan keterikatan oleh norma-norma. Jadi, norma-norma tidak menghambat adanya kebebasan, tapi justru *memungkinkan* tingkah laku bebas. K. Bertens, *Op.cit.*, hlm. 100-102
- ⁴⁰ Lihat QS. Al-Mujādilah [58]: 11
- ⁴¹ Tradisi menyiratkan sesuatu yang sakral, seperti disampaikan kepada manusia melalui wahyu maupun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu dalam sejarah kemanusiaan tertentu untuk mana ia dimaksudkan, dalam satu cara yang mengimplikasikan baik kesinambungan horizontal dengan Sumber maupun mata-rantai vertikal yang menghubungkan setiap denyut kehidupan tradisi yang sedang diperbincangkan dengan Realitas Transenden metahistorikal. Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancab Dunia Modern*, diterjemahkan oleh Luqman Hakim, (Bandung Pustaka, 1994), hlm. 3.
- ⁴² Seyyed Hossein Nasr, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 12.
- ⁴³ Seyyed Hossein Nasr, “Islam dan Krisis Lingkungan”, diterjemahkan oleh Ihsan Ali-Fauzi, dalam *Jurnal Islamika*, No. 3, Januari-Maret 1994, hlm. 10.
- ⁴⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Pengetahuan dan Kesucian*, diterjemahkan oleh Suharsono, et.al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 187.
- ⁴⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Atias*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy, M. Arifin Ismail dan Iskandar Arnel, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 114.
- ⁴⁶ Seyyed Hossein Nasr, “Sains Islam, Sains Barat: Warisan Bersama, Nasib Berbeda”, dalam *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah*, No. 14, Vol. VI/Thn. 1995, hlm. 98. Dalam tulisannya yang lain, Nasr juga mengungkapkan bahwa dari cara pandang yang demikian itulah yang menyebabkan masyarakat modern berada di wilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun dalam lingkungan kosmisnya. Lihat juga dalam *Islam dan Nestapa*, *Op.cit.*, hlm. 3-6.
- ⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 95

Tentang Penulis

Irwandra, menyelesaikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Aqidah Filsafat. Kemudian melanjutkan S2 di PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini tercatat sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan mengampu mata kuliah Filsafat Akhlak (Etika) dan Filsafat Manusia.